

BAB I

PENDAHULUAN

"I want to thank the support of Pope Francis for the improvement of relations between Cuba and the U.S."

Raul Castro, ucapan terima kasih kepada Paus Francis atas dukungannya dalam proses normalisasi (Chadler 2014)

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas **Kebijakan Luar Negeri Kuba Terhadap Amerika Serikat Pada Era Pemerintahan Raul Castro Tahun 2008 – 2016.**

Raul Castro merupakan saudara dari Fidel Castro, pemimpin Kuba dari tahun 1959 - 2006. Pada tanggal 31 Juli 2006, Raul Castro dikukuhkan sebagai presiden sementara, menggantikan Fidel Castro yang kala itu sakit, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai presiden (Klepak, Raúl Castro and Cuba : A Military Story 2012, 98). Pada Februari 2008, setelah melalui pertimbangan dari politburo partai Komunis Kuba dan *Assembly National*, Raul Castro dikukuhkan menjadi presiden Kuba (McKinley 2008). Suksesi kepemimpinan tersebut telah diramalakan, mengingat Raul Castro merupakan wakil sekretaris jenderal partai komunis Kuba (Klepak, Raúl Castro and Cuba : A Military Story 2012, 96).

Raul Castro sebelum menjabat sebagai Presiden, merupakan wakil presiden Fidel Castro (Klepak, Raúl Castro and Cuba : A Military Story 2012). Tidak hanya menjadi wakil presiden, Raul Castro menempati beberapa posisi penting di cabinet Fidel, seperti menjadi menteri pertahanan Kuba, sejak tahun 1959 – 2006 (D. P. Erikson n.d.). Sama seperti Fidel Castro, Raul Castro merupakan alumni dari perang revolusi Kuba pada tahun 1959 (Klepak, Raúl Castro and Cuba : A Military Story

2012, 57). Selama perang revolusi, Raul Castro selalu loyal dengan kepemimpinan Fidel Castro, dan bahkan menjadi salah satu komandan dalam perang Revolusi (Louis A. Perez 2006, 223). Menurut beberapa analis politik Kuba, bahwa Raul Castro akan menjalankan roda pemerintahan sama seperti Fidel Castro, tetapi Volker Skierka mendeskripsikan Raul sebagai transitional presiden (Borger 2016).

“Raúl is a transitional president between the old guard and the future and in that sense he has performed well. He has kept the country stable,”
(Borger 2016).

Dapat diartikan bahwa masa pemerintahan Raul Castro merupakan transisi akan suatu pemerintahan Kuba dari angkatan revolusi tahun 1959 kepada generasi masyarakat Kuba yang baru. Dalam menyikapi hubungan dengan Amerika Serikat, Raul Castro mempunyai sikap yang berbeda dengan saudaranya Fidel Castro. Raul Castro mencoba untuk memperbaiki hubungan Kuba dengan Amerika. Ucapan Raul Castro ketika pertemuan dengan Barrack Obama, pada saat salah satu sesi pertemuan bilateral *Organisation of Americas*, yaitu kesediaan Kuba untuk melakukan dialog dengan Amerika Serikat atas dasar saling menghormati antara kedua negara (Hernández 2015).

Hal tersebut menjadi babak baru hubungan Kuba dengan Amerika Serikat. Dimana Kuba dan Amerika Serikat sendiri telah mengumumkan pada 17 Desember, bahwa kedua belah negara tersebut akan melakukan restorasi hubungan diplomasi (Spanish 2014). Raul Castro mengatakan, bahwa kedua negara akan membuka kembali kedutaan besar di ibu kota Negara kedua belah pihak (Spanish 2014). Salah

satu tokoh penting, dalam membantu perbaikan hubungan Kuba dengan Amerika Serikat, adalah Paus Franciscus (Hirayama 2017). Dimana Raul Castro menyarankan agar kedua pemimpin, untuk mempertimbangkan perbedaan kedua negara ini untuk masa depan kedua penduduk negara Kuba dan Amerika Serikat yang lebih baik (Hirayama 2017).

Transisi kepemimpinan tersebut juga berdampak kepada pendekatan pembuatan kebijakan pemerintah. Hal ini terlihat dari perbedaan pandangan antara Fidel Castro dan Raul Castro. Pada era kepemimpinan Fidel Castro, Kuba cenderung bersikap idealis dalam menyikapi kebijakan yang anti dengan revolusioner, tetapi Raul Castro bersikap lebih pragmatis ketika berkaitan dengan ekonomi Kuba. Raul Castro mendukung akan pembicaraan dengan OAS pada tahun 2009, dimana OAS mengundang Kuba untuk kembali menjadi anggota, dan mempermudah Kuba mendapatkan akses pasar di Amerika latin (Mesa-Lago n.d.). juga Raul Castro mendukung pembicaraan kepada Amerika Serikat paska Barrack Obama terpilih menjadi presiden pada tahun 2008, dengan Obama mendukung untuk mengangkat embargo ekonomi, jika Kuba dapat menyetujui syarat yang diajukan oleh Amerika Serikat. Kedua tawaran yang diajukan tersebut ditolak oleh Fidel Castro, dan bahkan memboycot mengenai pembicaraan 2 agenda tersebut.

Naiknya Raul Castro sebagai presiden Kuba pada tahun 2008, diikuti dengan reformasi ekonomi, yang bertujuan untuk menghidupkan *private sector* (BBC News 2011). Deklarasi pada tahun 2008 tersebut, menjadi titik balik bagi Kuba, mengingat Kuba membatasi sektor privat. Sejak revolusi tahun 1959 Kuba menasionalisasi perusahaan asing dan privat. Kebijakan tersebut merupakan agenda

sosialis Fidel Castro, yang telah dicanangkan paska revolusi Kuba tahun 1959. Dengan runtuhnya soviet, sebagai patron utama Kuba pada tahun 1990, membuat Kuba mengalami krisis ekonomi. Dari pengalaman tersebut, Kuba belajar dari sebuah kesalahan, mengenai pentingnya perdagangan internasional. Raul Castro juga mendorong agar tumbuhnya investasi luar negeri di Kuba. Investasi tersebut merupakan stimulant ekonomi Kuba, dengan Kuba merubah kebijakan luar negeri, yang akomodatif sehingga mempermudah Negara – Negara lain untuk, menanamkan investasi luar negerinya di Kuba.

Kebutuhan akan investasi jika didukung oleh oleh turunnya pertumbuhan ekonomi Kuba pada tahun 2009 karena krisis ekonomi dunia, dari 12% pada tahun 2006, dan menginjak titik terendah pada tahun 2009 dengan pertumbuhan 1,5% (Bank, World Bank Org 2016). Krisis tahun 2009 menghantam ekonomi Kuba, dengan perdagangan yang stagnan dan juga deficit. Hal tersebut membuat ekonomi Kuba jatuh juga kuba mengalami kerugian dengan trade balance menunjukkan angkut minus \$10,8 milyar dollar (Mesa-Lago n.d.).

Alasan lain yang mendasari perubahan kebijakan kuba atas Amerika yaitu seorang Barrack Obama yang terpilih kembali pada 2012 sebagai presiden Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bahwa sejak awal revolusi Kuba pada tahun 1959 Amerika selalu berposisi dengan Amerika melakukan sebuah embargo bahkan invasi langsung ke Kuba (Lamrani, 2013, hal. 23). Era Kennedy dengan *Bay Pig Invasion* juga *Cuban Missile Crisis*, dalam masa Reagan ataupun Bush sr yang juga memiliki agenda yang sama seperti pendahulu mereka dengan tidak mencabut embargo ekonomi terhadap Kuba. Juga terutama seperti yang telah dikaji mengenai

Helms-Burton act era Bill Clinton yang menghancurkan ekonomi Cuba paska Soviet, ataupun Bush Dengan *War on Terrorism*.

Tetapi Barrack Obama dalam kampanyenya, dia menginginkan sebuah perubahan dalam dimana dalam debat dengan Hillary Clinton pada pemilihan kandidat dari partai Demokrat, Obama menginginkan bahwa perlunya penghentian embargo bagi Kuba (Fernandes, 2009, hal. 25). Walaupun di lembaga legislative sendiri banyak tokoh penting yang masih mempunyai darah Kuba dari keturunan imigran Kuba. Para keturunan Kuba ini menghalangi Amerika Serikat untuk menghentikan embargo ekonomi ke Kuba beberapa tokoh penting yaitu senator Rubio dari Florida (Republican) dan Bob Menendez dari New Jersey (Democratic), juga ada organisasi perkumpulan keturunan Kuba yaitu *Cuban American National Foundation* sebuah NGO yang mengkaji tentang pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan sangat aktif dalam mengadvokasi agar embargo tetap berlanjut di Kuba.

Ketika pemakaman Nelson Mandela di Afrika Selatan, presiden Barrack Obama bertemu dengan Raul Castro. Sebuah momen bersejarah ini diawali dengan Presiden Raul Castro memperkenalkan namanya dahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Obama dengan tersenyum dan memberikan sebuah jabat tangan (Roberts, *The Guardian* 2013). Hal ini menjadi sebuah momen yang sangatlah menarik dan bersejarah. Raul Castro dan Obama setelah pertemuan ini melakukan *back channel diplomacy* sebagai sarana untuk menormalisasi hubungan Kuba dengan Amerika. Orang – orang yang berpengaruh adanya hal ini yaitu Deputy National Security Advisor Benjamin Rhodes dan Ricardo Zuniga the director for Western

Hemisphere Affairs dengan bantuan Vatikan dan Kanada menjadi pihak ketiga. Pertemuan – pertemuan rahasia dilakukan di Washington, Ottawa, Roma dan Havana (Kornbluh dan Leo Grande, 2014, hal. 70 – 77).

Kontak langsung dilakukan oleh Havana dan Washington pada 20 Desember 2014 pukul 16.00 waktu Amerika kedua belah pihak, presiden Obama dengan para penasehat senior dan juga Presiden Raul Castro melakukan telepon bersejarah (W. M. LeoGrande, Back Channel to Cuba 2014, 179). Diplomasi telepon ini menjadi salah satu awal bersejarah normalisasi hubungan Amerika Serikat dan Kuba. Kedua belah pihak menginginkan hal yang terbaik bagi kedua negeri. Tetapi banyak persyaratan yang ingin dilakukan yaitu agar Cuba menghargai Hak Asasi Manusia. Usaha normalisasi hubungan diplomatik ini menjadikan sebuah kebahagiaan bagi Negara Amerika Latin, dengan harapan hubungan Kuba dan Amerika Serikat dapat berjalan kembali normal.

Hubungan Kuba dengan Amerika Serikat menjadi sebuah topik yang sangat menarik untuk dikaji, mengingat bagaimana sejarah dari kedua negara tersebut. Masa Raul Castro menjadi sebuah babak baru dan masa Raul Castro menjadi sebuah transisi menuju Kuba yang baru. Dengan Kebijakan Raul Kastro terhadap Amerika Serikat dan dunia internasional yang akomodatif sangatlah diapresiasi, dengan harapan Kuba menjadi Negara yang lebih terbuka.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat dari latar belakang diatas maka dibuatlah *research question* :

“Mengapa kebijakan luar negeri Kuba menjadi lebih kooperatif terhadap Amerika Serikat, setelah pergantian kekuasaan dari Fidel Castro ke Raul Castro?”

C. Landasan Teoritik

Untuk membantu menjawab pertanyaan dari *research question*, penulis menggunakan sebuah teori sebagai alatbantu untuk menjawab pertanyaan. Juga fungsi teori adalah untuk memberikan *explanatory framework* untuk beberapa observasi, dan juga asumsi beberapa kemungkinan hipotesis yang akan diuji dalam membantu riset ini.

Menurut Mohtar Mas'ood, teori merupakan sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi tersebut terdapat konsep – konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep – konsep secara logis (Masoed 1990, 189) . Oleh karena itu sebuah teori bisa diibaratkan sebagai suatu jaringan yang kompleks. Dalam ilmu sosial sendiri, Teori memiliki dua fungsi. Pertama, teori berguna bagi peneliti untuk mengorganisasikan data. Kedua teori memungkinkan mengembangkan prediksi bagi situasi – situasi yang belum ada datanya. Prediksi membawa kepada hipotesis yang menjadikan tindakan penelitian lebih terarah, efisien, dan sistematis (Masoed 1990, 184 - 189). Untuk menjawab latar belakang permasalahan yang ada disini penulis menggunakan sebuah Teori Kebijakan Luar negeri dari William D Coplin, dimana teori tersebut akan membantu menjawab penelitian Kebijakan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Kuba terhadap Amerika Serikat dari Era Fidel Castro ke era Raul Castro.

Sebelum membahas tentang kedua teori tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari Hubungan Internasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijakan luar negeri adalah.

“foreign policy is a strategy or planned course of action developed by the decision makers of state vis a vis other state or international entities aimed achieving specific goal defined in terms of national interest” (olton 1988, 6).

Adapun Felix Gross dalam *Foreign Policy Analysis* menyebutkan bahwa politik luar negeri dalam aspek yang dinamis merupakan sebuah sistem tindakan suatu pemerintahan terhadap pemerintahan lain atau suatu negara terhadap negara (Roy 1995, 33).

Negara membuat sebuah kebijakan internasional yang melalui pertimbangan yang matang dari sebuah *group of decision makers*. Sebuah kepala Negara atau menteri luar negeri pada dasarnya menjadi sebuah penentu dari arah kebijakan luar negeri, ataupun dalam beberapa Negara, lembaga legislative mempunyai peran yang penting dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Beberapa kebijakan luar negeri juga merupakan hasil dari implikasi kebijakan luar negeri Negara lain. Sebuah kebijakan ini diramu melalui pertimbangan yang dalam, karena kebijakan luar negeri merupakan hal yang sangat fluktuatif akibat dari isu isu internasional yang dapat berubah setiap saat.

National interest yang dapat dicapai menjadi sebuah kriteria penting Negara berhasil menerapkan kebijakan luar negeri, determining situasi internasional dan

factor dalam negeri untuk mencapai tujuan dari *foreign policy*, menganalisa kapabilitas suatu Negara untuk mendapatkan hasil yang maksimal, membuat sebuah rencana dengan beberapa variable untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan evaluasi tentang progress yang dicapai secara berkala.

Namun beberapa skema tersebut menjadikan bagaimana sebuah *foreign policy* dapat terbentuk. Dari beberapa hal yang dapat kita pahami mengenai kebijakan luar negeri tersebut merupakan sebuah aksi suatu Negara untuk mendapatkan sebuah keinginan yang terbatas. Kebijakan luar negeri dibentuk untuk membantu dan mempertahankan national interest suatu Negara, national security, tujuan ideology dan kemakmuran ekonomi.

Teori Pengambilan Kebijakan Luar negeri William Coplin

Setelah kita melihat makna dari kebijakan luar negeri disini penulis mengkaji teori Kebijakan Luar Negeri dari William Coppin. Menurut William Coplin Suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Ada beberapa aspek yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum memahami cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap sebuah isu. William D. Coplin menggunakan analisis pendekatan rasionalitas dalam bukunya, *Introduction to Internasional Politics*.

Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa Negara berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut Negara mengkalkulasikan secara rasional situasi dan, posisi Negara di dalam kancah politik global. Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara

merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional.

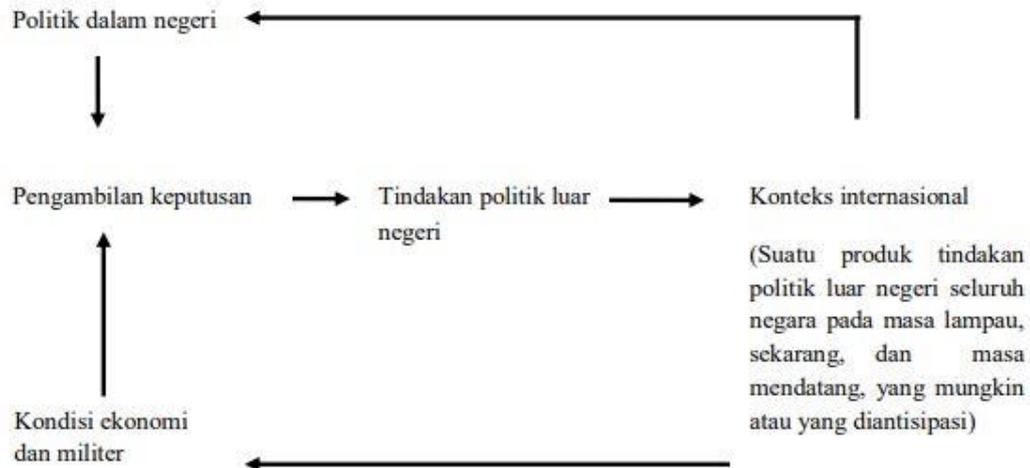
Menurut William D.Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau Foreign policy, Yaitu (Coplin 2003) :

“ apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :

- Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya.
- Situasi Ekonomi dan Militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
- Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Untuk lebih jelas dalam memahami teori pembuatan kebijakan politik luar negeri William Coppin maka berikut ditampilkan model pembuatan kebijakan politik luar negeri William Coplin.

Diagram Teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri



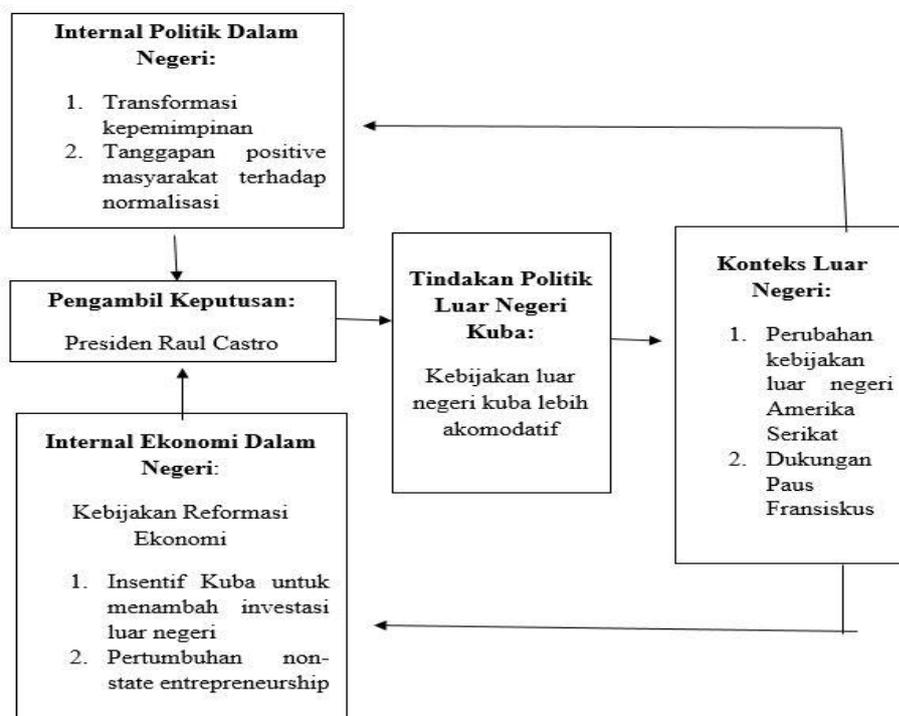
Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis Edisi Kedua (Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal.30)

Model pembuatan kebijakan luar negeri William Coplin diatas dapat disimpulkan bahwa faktor politik dalam negeri, situasi politik Internasional dan ekonomi atau militer menjadi sebuah penentu suatu negara mengartikulasikan politik luar negerinya. Sehingga formula tersebut saling berpengaruh satu antar lain mendorong timbulnya kebijakan politik luar negeri.

Dari model yang ditulis di atas penulis mencoba untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan politik luar negeri dari studi kasus yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini yaitu, Perubahan Kebijakan Luar Negeri Kuba terhadap

Amerika Serikat dari era Fidel Castro ke era Raul Castro, dengan aplikasi teori sebagai berikut.

Dengan gambaran tersebut penulis meletakkan bahwa kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi, dan konteks internasional, menjadi factor – factor perubahan kebijakan luar negeri Kuba terhadap Amerika Serikat yang lebih akomodatif. Dari aspek politik terlihat bagaimana pergantian kekuasaan antar Fidel Castro kepada Raul Castro mempunyai sebuah perubahan penting. Dalam suatu Negara ada aktor – aktor politik yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Actor – actor tersebut mempunyai “*power*” (kekuatan) yang kuat untuk menyetir sebuah kebijakan luar negeri.



Kuba adalah negara yang mempunyai sejarah panjang mengenai dinamika politik dalam ataupun luar negeri, terutama setelah revolusi Kuba pada tahun 1959.

Kuba menggunakan ideologi komunis, sebagai *weltanschauung* untuk menjalankan roda pemerintahan. Kuba sendiri memiliki struktur kekuasaan yang rigid. PCC (*Partido Comunista de Cuba*) berada di puncak dari struktur kekuasaan Kuba. Walaupun Kuba sendiri memiliki sebuah badan legislative yaitu *Asamblea Nacional del Poder Popular*, yang berjumlah 612 orang (E. B. Editors n.d.). Tetapi badan legislative tersebut hanyalah bagian kecil dari partai Komunis, dimana mayoritas kursi legislative diduduki oleh kader PCC.

Para pembentuk kebijakan utama berada di tangan para Politburo partai komunis. Politburo hanya berjumlah tidak lebih dari 20 individual yang mempunyai sebuah kekuasaan politik tertinggi di Kuba, dengan saat ini Raul Castro menjadi sekretaris jenderal partai komunis kuba. Kabinet atau *council of state* yang tentu saja juga diketuai oleh Raul Castro, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partai komunis. Maka dapat kita ketahui bahwa Secretary General PCC merupakan sebuah *single entity* (kesatuan tunggal) *of cuba foreign policy*.

Penulis juga mengkaji Kuba dalam bidang ekonomi. Seperti tertera dalam teori William Coppin, ekonomi merupakan salah satu konsideran terbentuknya sebuah kebijakan luar negeri. Seperti kita ketahui sejak tahun 1961, Kuba terkena embargo ekonomi oleh Amerika Serikat, sebagai akibat dari konflik misil Kuba. Tidak hanya embargo, Kuba juga mengalami sebuah pengasingan politik, dengan diusirnya Kuba dari *Organization of Americas* (OAS).

Reformasi Ekonomi yang dicanangkan oleh Raul Castro membuat adanya sebuah orientasi kebijakan luar negeri Kuba terhadap Amerika Serikat yang

berorientasi kooperasi ekonomi. Setelah dibukanya hubungan diplomatic dari agustus 2015 yang lalu, jumlah pengunjung dari Amerika Serikat ke Kuba menjadi melonjak. Hal ini juga didukung dengan mudahnya mendapatkan transportasi dari Amerika menuju Kuba. Kuba sendiri mempermudah masyarakatnya untuk membuka usaha yang mendukung pariwisata, sebagai contoh yaitu restoran dan juga perhotelan.

Dalam konteks internasional, pendekatan *soft power* yang dicetuskan Barrack Obama merupakan salah faktor kenapa Kuba mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat memandang bahwa embargo ekonomi yang dilayangkan kepada Kuba sangatlah tidak efektif.

Upaya negosiasi juga didukung oleh oleh Paus Franciskus yang dapat meyakinkan kedua belah pihak untuk saling membuka hubungan luar negeri, demi kebaikan warga negara kedua belah pihak (Hirayama 2017). Usaha normalisasi diwujudkan dengan adanya *back channel diplomacy*. Dimana kedua Negara, secara rahasia melakukan kontak, untuk membahas normalisasi hubungan diplomatik. Kedua hal tersebut, menjadi factor determinan ketiga.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang telah dijelaskan diatas maka dapat diperoleh hipotesa atau jawaban sementara dari penelitian ini yaitu : **Cuba pada era Raul Castro mempunyai kebijakan luar negeri yang lebih kooperatif pada Amerika karena :**

1. Kebutuhan reformasi ekonomi Kuba pada era Raul Castro, bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Kuba.
2. Transisi pemerintahan Kuba dari Fidel Castro kepada Raul Castro.
3. Dukungan normalisasi oleh Paus Fransiskus.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data studi sekunder, dalam hal ini penulis mencari literatur – literature yang relevan untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Seperti buku – buku terkait Kuba, terutama kebijakan Kuba dan Amerika dalam era Raul Castro, yang dibandingkan dengan kebijakan Kuba di era Fidel Castro. Penulis juga menggunakan bahan penelitian lain berupa, Artikel, berita (news), data elektronik (internet) dan data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

2. Metode Pengolahan Data

Penulis menggunakan metode deduktif yaitu, mengelaborasi teori untuk kemudian dapat diaplikasikan pada kasus yang diteliti oleh peneliti. Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri untuk dijadikan landasan analisa dalam menjawab pokok permasalahan penelitian yaitu, kebijakan Kuba kepada Amerika di era Raul Castro pada tahun 2006 – 2016.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yang berjudul” **Perubahan Kebijakan Luar Negeri Kuba Terhadap Amerika Serikat Pada Era Kepemimpinan Raul Castro Tahun 2008 – 2016**” ini ialah :

1. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait transformasi kebijakan Kuba ke Amerika pada era Raul Castro sejak turunnya Fidel Castro.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor perubahan kebijakan luar negeri Kuba, factor determinaan yang mendorong Cuba memperlunak kebijakan Cuba kepada Amerika.

G. Batasan Penelitian

Sangatlah penting untuk mempunyai suatu batasan akan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Sehingga topik yang akan dibahas tidak akan melebar keluar dari konteks penelitian. Dengan isu yng dibahas dalam skripsi ini yaitu mengkaji kebijakan Cuba pada era kepemimpinan Raul Castro. Adapun era Raul Castro memimpin Kuba dimulai pada tahun 2008 sampai tahun 2016. Terutama mengkaji kebijakan Raul Castro terhadap Amerika, beserta alasan, analisa, dan konteks Internasional berdasarkan fakta – fakta yang dikaji oleh peneliti.

H. Sistemika Penulisan

Dalam penelitian ini untuk menghasilkan karya tulis yang terpadu makapenulis akan membagi penjelasan – penjelasan dalam beberapa bab. Dimana setiap bab

akan mengkaji secara spesifik mengenai kasus ini. Juga setiap bab akan mempunyai korelasi dan saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Berikut adalah perumusan bab penelitian secara kualitatif ini :

BAB I Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan dan Aplikasi Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II mengkaji landscape dan profil Kuba, serta proses transformasi kepemimpinan di Kuba dari Fidel Castro kepada Raul Castro.

BAB III. Menjelaskan orientasi kebijakan luar negeri Kuba di era Raul Castro juga menengeni proses normalisasi hubungan diplomatic dengan Amerika Serikat.

BAB IV menjelaskan determinan – determinan yang membuat Kuba merubah kebijakan terhadap Amerika Serikat.

BAB V merupakan bab kesimpulan, yang berisi kesimpulan dari karya tulis ini.